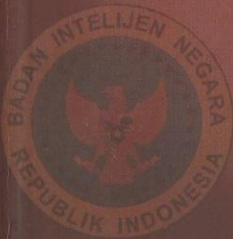


Editor: MURADI

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL



Pusat Studi Politik & Keamanan
Universitas Padjadjaran

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL
Copyright © Muradi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau isi seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-18753-1-5

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL
Editor: Muradi
Layout & Ilustrasi: Arseindy

Cetakan I, Januari 2013
14 X 21 cm
v + 140

Diterbitkan oleh Penerbit Dian Cipta
untuk Pusat Studi Politik & Keamanan
Universitas Padjadjaran

Kontak Penerbit
Jl. Mayang Cinde No.13
Ujungberung - Bandung
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-780-1169
Email: dianciptapublishing@gmail.com
<http://dcp.wordpress.com>

BAB X

KEAMANAN NASIONAL DAN AKSEBILITAS PUBLIK

Mahi M. Hikmat

Pendahuluan

Salah satu kelemahan prosedural dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia adalah "pengabaian" aksesibilitas publik. Proses penyusunan sampai penetapan peraturan perundang-undangan seringkali tidak membuka ruang yang cukup bagi publik untuk berkontribusi. Kewenangan DPR RI dalam menetapkan Undang-Undang, kewenangan Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan seringkali dijadikan alasan pembenar. Kesertaan DPR, kendati hanya beberapa orang dalam wadah Komisi atau Pansus sering dianggap sebagai representasi suara publik alih-alih suara rakyat. Amanah undang-undang yang menyuratkan kewenangan Pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan seringkali ditafsirkan lepas dari persoalan memperhatikan suara rakyat.

DPR dan Pemerintah seringkali menganggap sudah cukup ketika penyusunan kebijakan hanya melalui uji publik di media massa. Setelah ditetapkan, selama sudah dimasukan pada Lembaran Negara, seringkali dianggap cukup dan dapat mengikat langsung seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Mereka seolah tanpa memperhitungkan dampak luas dari kebijakan yang dibuatnya. Padahal, sangat memungkinkan kebijakan yang mereka buat tidak hanya berkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat memasuki ranah privat warga negara yang notabene selayaknya dilindungi oleh negara.

Keamanan Nasional dan Akseibilitas Publik

Oleh : Mahi M. Hikmat

Pendahuluan

Salah satu kelemahan prosedural dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia adalah “pengabaian” akseibilitas publik. Proses penyusunan sampai penetapan peraturan perundang-undangan seringkali tidak membuka ruang yang cukup bagi publik untuk berkontribusi. Kewenangan DPR RI dalam menetapkan Undang-Undang, kewenangan Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan seringkali dijadikan alasan pembenar. Kesertaan DPR, kendati hanya beberapa orang dalam wadah Komisi atau Pansus sering dianggap sebagai representasi suara publik alih-alih suara rakyat. Amanah undang-undang yang menyuratkan kewenangan Pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan seringkali ditafsirkan lepas dari persoalan memperhatikan suara rakyat.

DPR dan Pemerintah seringkali menganggap sudah cukup ketika penyusunan kebijakan hanya melalui uji publik di media massa. Setelah ditetapkan, selama sudah dimasukan pada Lembaran Negara, seringkali dianggap cukup dan dapat mengikat langsung seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Mereka seolah tanpa memperhitungkan dampak luas dari kebijakan yang dibuatnya. Padahal, sangat memungkinkan kebijakan yang mereka buat tidak hanya berkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat memasuki ranah privat warga negara yang notabene selayaknya dilindungi oleh negara.

Inilah di antaranya yang menjadi penyebab utama setiap lahir kebijakan selalu diikuti tingginya angka pelanggaran. Warga negara melanggar pun karena punya alasan kuat. Mereka tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut. Bahkan, pada era lahirnya MK (Mahkamah Konstitusi) yang dibekali dengan kewenangan membatalkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang, fenomena uji materil (*judicial review*) nyaris menjadi kebiasaan. Tidak sedikit pula UU yang baru diberlakukan hari ini; hari itu juga muncul uji materil dan beberapa hari setelah itu, ada saja pasal yang dibatalkan.

Jika realitas tersebut terus berlangsung akan merupakan preseden buruk bagi citra dan wibawa negara ke depan. Disharmonis antara rakyat dan Pemerintah pun akan terus terjadi. Komunikasi politik dalam pengelolaan negara akan makin senjang. DPR dan Pemerintah makin *getol* memproduksi peraturan perundang-undangan dengan berbagai pertimbangan politik, termasuk di dalamnya memperkokoh kekuasaan atas kekritisian rakyat yang makin cerdas. Rakyat pun makin segan untuk taat dan selalu berusaha mematahkan berbagai

kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Kenyataan itu bukan hal yang tidak mungkin melahirkan konflik.

Terlebih jika kebijakan itu menyentuh langsung pada hak-hak strategis rakyat atau dipersepsi dapat mengkooptasi kebebasan rakyat sembari mengabaikan akseibilitas rakyat. Perlawanan rakyat pun tidak akan selamanya bertahan pada wilayah-wilayah legal formal. Itulah yang dikhawatirkan banyak pihak.

Sebagaimana Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang mendapat penolakan dari banyak pihak karena dipersepsi dapat mengkooptasi kebebasan sipil dan membuka ruang yang lebar bagi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, permasalahan RUU Kamnas tidak berkuat pada kelemahan prosedural saja, tetapi secara substansial pun. Hal itulah yang menguatkan akseibilitas publik harus dibuka lebar sehingga UU Kamnas ke depan merupakan potret dari ekpresi publik; kehendak seluruh elemen rakyat Indonesia.

Akseibilitas Rakyat pada Negara Demokrasi

Ketika Indonesia berkomitmen untuk memilih demokrasi sebagai salah satu pilar penyelenggaraan negara, maka sejak itu pula sejatinya kran akseibilitas seluruh rakyat dibuka lebar. Setidaknya, empat dari sepuluh alasan utama demokrasi dipilih sebagai pilar penyelenggaraan negara adalah karena demokrasi menjamin hak asasi warga negara, menjamin kebebasan pribadi yang luas, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri, dan menjamin persamaan hak politik terhadap warga negara (Surbakti dkk.2008). Keempat hal itulah yang menjadi alasan kuat bagi negara demokrasi seperti Indonesia sehingga segala kebijakan yang dibuat Pemerintah harus selalu berlandaskan kehendak rakyat.

Apalagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia tentu tidak hanya ingin terjebak pada pusaran demokrasi prosedural sebagaimana dirumuskan Schumpeter (1947). Demokrasi ini memformat partisipasi rakyat hanya terhenti pada penunaian hak pilih untuk menentukan Pemerintah yang bertugas membuat dan melaksanakan UU serta kebijakan publik lainnya. Tidak juga sampai pada demokrasi agregatif dari Dahl (1989) yang memandang partisipasi cukup dalam bentuk preferensi dan pandangan warga negara secara umum yang dijadikan acuan pembuatan kebijakan publik. Bukan juga hanya sampai pada demokrasi deliberatif dari Gutmann (1998) yang hanya menitikberatkan pada daya terima warga negara terhadap kebijakan publik.

Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia sejatinya adalah demokrasi partisipatoris dari Barber (1984) yang merupakan demokrasi derajat tertinggi. Demokrasi ini memandang

warga negara berinteraksi secara langsung dalam membahas pilihan UU atau kebijakan publik yang dilahirkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama. Warga negara ikut berperan aktif dalam menentukan kebijakan Pemerintah, terlebih jika membicarakan nasib mereka. Demokrasi ini pula yang memberikan aksesibilitas paling lebar pada warga negara untuk menentukan kebijakan publik pilihan mereka.

Oleh karena itu, upaya siapapun yang mencoba menghalangi atau menyekat aksesibilitas rakyat terhadap penyelenggaraan negara merupakan tindakan yang kontraproduktif dengan semangat negara demokrasi. Hal itu makin kuat ketika dimasukkannya Pasal 28 F pada UUD 1945 yang menjadi sumber hukum bagi lahirnya sejumlah UU yang menjamin kebebasan warga negara untuk berekspresi demi kebaikan bangsa dan negaranya.

Hal itu sejalan dengan jaminan aksesibilitas warga negara, baik individu maupun kelompok, pada dokumen-dokumen yang dimiliki Badan Publik dengan lahirnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU KIP ini dengan tegas dinyatakan bahwa jaminan aksesibilitas publik terhadap informasi yang dimiliki Badan Publik, di antaranya bertujuan: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kendati UU KIP fokus pada aksesibilitas informasi publik, tetapi pada intinya memberikan penguatan pada aksesibilitas warga negara untuk berperan aktif dalam setiap pengambilan kebijakan publik sebagaimana rumusan demokrasi partisipatoris. Dalam konteks pengelolaan negara, Pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, terlebih kebijakan strategis seperti kebijakan keamanan nasional.

Kebijakan Keamanan Nasional

Di negara manapun, kebijakan tentang Keamanan Nasional merupakan kebijakan yang sangat strategis karena menyangkut eksistensi sebuah negara. Ketika berbicara eksistensi negara, maka juga berbicara tentang eksistensi bangsa dan nasib rakyatnya. Ketika eksistensi sebuah negara terancam, maka ancaman bagi bangsa itu dan juga merupakan ancaman bagi rakyatnya. Oleh karena itu, wajar jika ada pihak yang berpendapat bahwa bicara Kebijakan Keamanan Nasional, maka bicara juga tentang hak dan kewajiban warga

negara dalam membela negaranya. Menjaga dan menciptakan keamanan nasional merupakan kewajiban, bahkan hak bagi semua warga negara.

Terkait tentang hak dan kewajiban warga negara untuk membela negaranya, dalam konteks ke-Indonesian, Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 sudah dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Hal ini pulalah yang di antaranya munculnya pendapat ketika berbicara kebijakan keamanan nasional identik dengan melahirkan kebijakan bela negara yang lebih rinci sebagai penjabaran dari amanah UUD 1945.

Lebih tegas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia terhadap pertahanan dan keamanan negara diatur dari Pasal 30 UUD 1945. Bahkan, dalam pasal ini pula mulai munculnya pembeda lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan dari gangguan “eksternal” dan gangguan “internal”, yakni TNI dan Polri yang lebih lanjut diatur dalam UU tentang kedua lembaga negara tersebut.

Oleh karena itu, ketika berbicara tentang kebijakan keamanan nasional, maka berbicara tentang sinergisitas pelaksanaan kedua pasal tersebut, selain pasal-pasal lain dalam UUD 1945 dan UU pelaksana lainnya yang substansinya berbicara penguatan eksistensi negara, termasuk tentang tugas dan kewenangan Presiden dan DPR. Namun, dari semua itu posisi yang paling krusial dan harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional adalah kesertaan rakyat Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam persepektif komunikasi politik, penempatan kedaulatan berada di tangan rakyat berada pada ayat (2) menunjukkan prioritas landasan pengambilan kebijakan nasional setelah diyakini berdasarkan negara kesatuan yang berbentuk republik pada ayat (1)-nya plus juga berdasarkan hukum yang berlaku pada ayat (3)-nya.

Dasar ini pula yang makin menguatkan bahwa aksebilitas rakyat merupakan prioritas utama dalam kebijakan keamanan nasional ketimbang menguatkan peran Presiden, DPR, termasuk peran TNI dan Polri. Kebijakan keamanan nasional, selain memperjelas peran Presiden, DPR, TNI, dan Polri sebagaimana amanah UUD 1945 dan UU yang mengatur keempat lembaga tersebut, lebih utama memprioritaskan aksebilitas rakyat.

Dalam konteks ini, yang dimaksud aksebilitas rakyat bukan sekedar memberitahukan, memahami, dan menyadarkan rakyat akan pentingnya keamanan nasional. Rakyat pun harus menjadi **subyek**, bahkan melebihi peran Presiden, DPR, TNI, dan Polri. Kendati dalam perspektif politik, DPR plus DPD dapat dianggap sebagai representasi suara rakyat. Namun, dalam kondisi krisis kewibawaan yang tengah mendera lembaga legislatif; dalam pusaran makna bahwa anggota DPR lebih memprioritaskan kepentingan Parpol dan terbatasnya

kewenangan DPD, hal itu tidak dapat dijadikan sandaran telah terpenuhinya aksesibilitas rakyat.

Aksesibilitas rakyat sebagai subyek pun tidak dipersepsi sebagai aksesibilitas prosedural yang hanya membuka ruang yang lebar terhadap kesertaan rakyat dalam merumuskan, membuat, dan menetapkan kebijakan keamanan nasional. Aksesibilitas rakyat juga harus dipandang secara substansial dengan meminimalisasi, bahkan menghilangkan penempatan rakyat alih-alih warga negara sebagai obyek penderita. Hal itu berangkat dari sejumlah pasal dalam RUU Kamnas yang substansinya menyiratkan, bahkan menyuratkan menempatkan pemegang kekuasaan secara superioritas yang notabene yang menjadi obyeknya warga negara, baik secara personal maupun kelembagaan.

“Pengabaian” aksesibilitas rakyat secara substansial inilah yang menyiratkan citra bahwa kebijakan keamanan nasional melalui RUU Kamnas hanya untuk mengamankan kekuasaan sembari mengkooptasi hak warga negara. Citra itu makin menguat tatkala sejumlah substansi RUU Kamnas juga menyiratkan penempatan Presiden dan TNI sebagai subyek superioritas dalam mengidentifikasi ancaman keamanan nasional yang juga menempatkan warga negara sebagai obyek. Oleh karena itu, wajar jika pesan dan kesan yang sampai kepada rakyat adalah kekhawatiran RUU Kamnas ini dijadikan tameng bagi penguasa yang didukung militer untuk membekap kebebasan warga negara.

Secara teoretis, Teori Elaborasi Pesan memandang bahwa pesan yang disampaikan pemberi pesan (komunikator) tidak dapat dimaknai secara utuh oleh penerima pesan (komunikan), tetapi ber-elaborasi dengan lingkungan dan tingkat kognisi penerima pesan. Pesan yang disampaikan RUU Kamnas pun tidak hanya dimaknai utuh dari substansi pasal-pasal saja, tetapi juga ber-elaborasi dengan lingkungan dan kognisi rakyat Indonesia, sehingga makna yang lahir adalah kekhawatiran.

Rakyat Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit hidup dalam lingkungan negara yang nyaris otoriter dalam dominasi militer. Trauma masa lalu yang telah menjadi kognisi sebagian besar rakyat Indonesia ber-elaborasi dengan pasal-pasal dalam RUU Kamnas yang dipersepsi nyaris sama, maka makna yang keluar adalah penolakan. Sejumlah elemen strategis rakyat Indonesia menolak penetapan RUU Kamnas menjadi UU. Mereka khawatir kisah masa lalu terulang kembali.

Pemaknaan pesan seperti itulah yang menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi Pemerintah dan DPR untuk meyakinkan niat baik mereka dengan RUU Kamnas ini. Solusi yang tepat untuk meningkat citra terhadap pemaknaan pesan tersebut tak dapat ditawarkan lagi harus membuka ruang aksesibilitas memadai terhadap seluruh rakyat.

Akseibilitas Publik pada Kebijakan Keamanan Nasional

Banyak langkah yang dapat dilakukan dalam kerangka memperlebar akseibilitas rakyat dalam kebijakan keamanan nasional. Selain akseibilitas formal yang sudah dilembagakan melalui landasan peraturan perundang-undangan, perlu juga direkonstruksi terobosan baru yang lebih efektif dan konstruktif. Namun, bukan dalam bentuk rekayasa politik praktis yang menghalalkan segala cara.

Identifikasi akseibilitas rakyat dalam akseibilitas prosedural dan akseibilitas substantif sebagaimana dipaparkan di atas setidaknya dua hal yang realistis dapat ditawarkan. Kedua hal tersebut dapat menjadi rujukan dalam proses pengambilan kebijakan keamanan nasional. Kendati kebijakan ini sudah mewujudkan dalam bentuk RUU, tetapi demi kepentingan yang lebih besar bukan hal yang tidak mungkin mengulang kembali proses pembentukan kebijakan keamanan nasional tersebut dari titik nol kembali.

Sejumlah langkah krusial terkait dengan akseibilitas rakyat terhadap kebijakan keamanan nasional di antaranya dapat dimulai dengan upaya penyamaan persepsi tentang definisi keamanan nasional dan aspek-aspek untuk mewujudkannya. Secara sederhana boleh jadi secara teroretis dapat merujuk pada makna etimologi bahasa atau merujuk pada makna keamanan sebagaimana yang pernah tertara dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Konsep itu dapat ditawarkan terhadap rakyat melalui pelembagaan jaringan aspirasi, sehingga ditemukan titik kesepakatan pandangan terhadap keamanan dan aspek-aspek penunjangnya.

Hal itu penting dilakukan berangkat dari fakta sosiologis bahwa rakyat Indonesia sangat varian yang sangat memungkinkan melahirkan perspektif yang berbeda. Kondisi aman bagi budaya dan suku tertentu, misalnya, belum tentu sama pada budaya dan suku yang berbeda. Juga makna ancaman, tertib, anarkhis, sanksi, dan sejumlah konsep lainnya yang terkait erat dengan keamanan. Semua harus dicari titik temunya, sehingga pemaknaan yang berkembang dalam kognisi rakyat sama; setidaknya nyaris sama; setidaknya tidak menimbulkan kesalahpahaman pemaknaan.

Konsep-konsep tersebut dapat menjadi bahan substantif kebijakan keamanan nasional sembari memosisikan rakyat alih-alih warga negara sebagai subyek. Selama ini, banyak peraturan perundang-undangan, termasuk RUU Kamnas selalu menempatkan rakyatlah yang layak diatur, rakyatlah yang layak dipersalahkan, dan rakyatlah yang layak diberikan sanksi. Sementara itu, Pemerintah selalu menjadi sumber kebenaran, berkewenangan mempersalahkan sekaligus menjatuhkan sanksi. Padahal, yang sejatinya sumber kebenaran, layak mempersalahkan, dan layak menjatuhkan sanksi adalah Tuhan. Namun, ketika sebuah negara memiliki pilar penyelenggaraan negara demokrasi teori suara rakyat suara Tuhan

sangat memungkinkan untuk dapat dijadikan rujukan ketimbang suara penguasa mewakili Tuhan. Oleh karena itu, rakyatlah yang merupakan sumber “kebenaran”; rakyatlah yang layak mempersalahkan dan menjatuhkan sanksi. Konsepsi seperti itulah tampaknya yang harus dikembangkan dalam kebijakan keamanan nasional.

Namun, sebaik apapun konsep, ibarat sebuah pesan yang tidak dapat berdiri sendiri. Pesan bergantung dari model komunikasi yang terikat dalam teori sistem. Keberhasilan penyampaian pesan sangat ditentukan oleh aspek-aspek lainnya dalam model komunikasi tersebut. Misalnya, dalam model komunikasi paling klasik dari Aristoteles, keberhasilan penyampaian pesan sangat ditentukan oleh eksistensi komunikator dan komunikan yang baik setidaknya memenuhi tiga syarat: *expertise*: memiliki keahlian, *trustworthiness*: dipercaya, *attractiveness*: menarik (Hikmat, 2011).

Inilah salah satu problem maha berat yang dihadapi Indonesia kekinian. Komunikator kebijakan keamanan nasional adalah Pemerintah dan DPR yang sebagaimana diungkapkan di muka tengah didera krisis kepercayaan. Bisa jadi karena “dosa” Pemerintahan masa lalu atau memang Pemerintahan masa kini pun yang belum dapat memberikan jaminan kepercayaan karena masih banyak oknumnya yang berperilaku tidak amanah.

Oleh karena itu, upaya menguatkan keterpercayaan Pemerintahan harus dilakukan. Pemerintahan kekinian harus membangun citra positif di mata publik. Namun, membangun citra bukan berdusta. Citra adalah realitas (Berndstein dalam Ardianto, 2008). Program pengembangan dan perbaikan citra harus didasarkan pada realitas. Pemerintahan harus menunjukkan kinerja positif dengan data-data konkret dan jaminan akurasi kebenaran. Jika Pemerintahan dibangun dengan angka-angka pembohongan publik akan keropos; citra positif didapat sesaat, setelah itu sebaliknya. Jika citra positif sudah melekat, apapun yang diprogramkan Pemerintahan dimungkinkan akan mendapat dukungan besar dari seluruh rakyat. Jangankan hanya “persetujuan” kebijakan keamanan; jiwa pun pasti rakyat korbannya.

Aspek penting lain dari model komunikasi klasik adalah komunikasi. Dalam konteks ini, rakyat Indonesia. Kondisi rakyat Indonesia kekinian sebagaimana dikemukakan di atas tengah didera kekhawatiran, kegelisahan, keraguan, kecurigaan, sehingga mereka menerima pesan kebijakan keamanan nasional pun dipengaruhi kondisi kognisi tersebut. Untuk memulihkan kondisi itu pun perlu pekerjaan ekstra keras, pelan, bertahap, dan hati-hati.

Upaya memulihkan kondisi rakyat, di antaranya, dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif yang cerdas; memainkan *opinion leader* yang tepat, membangun *public opinion*

yang cermat dengan metode kontemporer yang terpercaya, misalnya, melalui data survei, hasil pooling, pemberitaan media massa, dan yang lainnya.

Dengan substansi kebijakan keamanan nasional hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat; Dengan Pemerintahan yang terpercaya; Dengan kondisi rakyat yang ‘sehat’ akan terbangun sinergisitas kesepahaman bersama mendukung kebijakan keamanan nasional. Karena, keamanan nasional adalah kebutuhan dan milik bersama, sehingga aksesibilitas pun harus bersama: rakyat dan Pemerintahan yang kuat.

Penutup

Upaya penguatan aksesibilitas rakyat selayaknya dilakukan terhadap setiap langkah Pemerintahan dalam mengambil kebijakan. Kendati DPR merupakan representasi rakyat sebagaimana fakta hasil Pemilu, tetapi tidak selayaknya mengabaikan aspirasi aktual dari rakyat ketika akan menetapkan UU dan kebijakan lainnya. Begitu juga Pemerintah, kendati Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres secara langsung melibatkan seluruh rakyat, tetap saja harus mempertimbangkan kehendak rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan sekecil apapun. Justru dengan mereka dipilih langsung oleh rakyat, baik DPR maupun Presiden harus selalu dapat membaca denyut nadi rakyat, artinya setiap kebijakan mereka harus mencerminkan kehendak rakyat.

Sekecil apapun kebijakan yang mereka buat pasti akan bersentuhan dengan rakyat, baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi kebijakan strategis seperti Kebijakan Keamanan Nasional, semua harus mempertimbangkan kehendak rakyat; Semua harus melalui prosedur pemberian aksesibilitas besar terhadap rakyat. Kecil atau besarnya kebijakan yang diambil hanya terkait dengan metode penyerapan aspirasi rakyat.

Langkah yang disampaikan di muka hanya langkah kecil bagaimana membuka aksesibilitas rakyat dalam pengambilan kebijakan di antara langkah alternatif lain yang ada. Namun, langkah kecil seperti itulah semoga dapat menjadi pendorong bagi makin baiknya kesempatan rakyat untuk ikut serta dan ikut bertanggungjawab atas setiap kebijakan yang diambil Pemerintahan. Langkah itu pun dapat menjadi bagian dari langkah reformasi birokrasi yang selalu ini sering menjadi persoalan pelit. Amiin. ***

Referensi

- Ardianto, Elvinaro.2008. *Strategi PR Politik Para Kandidat dalam Pilkada*. Bandung: Observasi
- Barber, Benyamin. 1984. *Strong Democracy Participatory Politics for a New Age*. Berkeleh,CA: University of California Press

Dalh, Robert. 1989. *Democracy and Its Critic*. New Haven,NU: Yale University Press

Gutmann, Amy and Dennis Thompson. 2004. *Why Deliberative Democracy*. Princeton,NU: Princeton University Press

Hikmat, Mahi M. 2011. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktek*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Muhtadi, Asep Saeful. *Kampanye Politik*. Bandung: Humaniora

Schumpeter, Joseph A. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper

Surbakti, Ramlan dkk. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta; Kemitraan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

RUU Keamanan Nasional 2012



PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL

Pro dan kontra pembahasan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional telah memberikan perspektif baru bahwa penataan kebijakan keamanan nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai permasalahan yang mengiringi hampir Sembilan tahun pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Kekompleksan masalah yang dihadapi, selain pada konteks kerja sama dan pembagian kewenangan yang belum jelas antar aktor keamanan, hingga masalah intervensi peran dan fungsi yang dirasakan menonjolkan kewenangan yang lebih besar hanya salah satu aktor keamanan saja. Situasi ini mengundang penolakan pembahasan baik dari aktor keamanan Negara hingga masalah penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan sipil.

Buku ini mencoba mengintegrasikan pemahaman pentingnya mengintegrasikan dan mengkomprehensifkan kebijakan keamanan nasional dengan penghormatan pada HAM dan kebebasan sipil dalam bentuk uraian tulisan yang dalam derajat tertentu berupaya tetap pada konteks akademik sebagai bagian dari sumbang saran kalangan akademik universitas untuk mencoba mengurai kebuntuan atas pembahasan RUU Kamnas yang telah memasuki tahun kesembilan tersebut. Bahwa dilemma memperkuat Negara atau memperkuat masyarakat sipil yang berkembang dalam pro-kontra pembahasan RUU Kamnas selama ini dituangkan secara berimbang dalam bab demi bab dalam buku ini. setidaknya pada situasi tertentu, buku ini dapat menjadi rujukan bagi alternative pemikiran untuk menuntaskan pembahasan RUU Kamnas agar tercapai kesepakatan yang tetap mengacu pada kepentingan Negara tanpa harus melanggar kebebasan sipil dan HAM.



Pusat Studi Politik & Keamanan
Universitas Padjadjaran



DC
DIAN CIPTA
2013